

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI PEMBENTUKAN
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DI DESA SUKAMAJU
KECAMATAN CIHAURBEUTI KABUPATEN CIAMIS**

***VILLAGE COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH THE ESTABLISHMENT
OF COMMUNITY INFORMATION GROUP IN SUKAMAJU VILLAGE,
CIHAURBEUTI DISTRICT, CIAMIS REGENCY***

Ii Sujai*, Otong Husni Taufiq, Irfan Nursetiawan, Dini Yuliani

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Galuh

*Email: sudjaipnd79@gmail.com

(Diterima 05-05-2021; Disetujui 05-08-2021)

ABSTRAK

Transformasi digital menjadikan data dan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi sumber utama dalam mendapatkan informasi yang valid. Perkembangan teknologi informasi juga diikuti dengan permasalahan sosial yang beriringan. Adapun masalah yang muncul di era disrupsi, yakni *hoax* dan kemiskinan. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengidentifikasi 1.731 *hoax* (berita bohong) terhitung sejak Agustus 2018 sampai dengan April 2019. Untuk menanggulangi hal tersebut dilakukan dengan pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang bertujuan untuk menanggulangi penyebaran *hoax* dan media pemberdayaan masyarakat. Adapun yang menjadi tujuan dari diadakannya kegiatan ini, yakni: (1) Mengadakan sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM); (2) Pembentukan KIM; dan (3) Melakukan pendampingan KIM. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini, yakni *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mengetahui potensi yang dimiliki masyarakat sebagai potensi SDM dan menggunakan metode pemberdayaan dengan langkah-langkah berikut: (1) tahap penyadaran; (2) *capacity building*; dan (3) *empowerment*. Hasil yang didapatkan, yakni telah terbentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Cibaruyan Desa Sukamaju Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis dan terfokus pada: (1) mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi; (2) mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah; (3) melaksanakan kegiatan informasi komunikasi melalui media cetak, media elektronik dan media tradisional; (4) meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menerima, menyaring dan menolak informasi; serta (5) sebagai mediator informasi dan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah dan pemerintah kepada masyarakat.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Teknologi Informasi, Masyarakat, Desa Sukamaju

ABSTRACT

Digital transformation makes data and Human Resources (HR) the main source in obtaining valid information. The development of information technology is also followed by social problems that go hand in hand. The problems that arise in the era of disruption, namely hoaxes and poverty. The Ministry of Communication and Information (Kominfo) identified 1,731 Hoaxes (fake news) from August 2018 to April 2019. To overcome this, the Community Information Group (KIM) was established which aims to tackle the spread of hoaxes and media for community empowerment. As for the objectives of holding this activity, namely: (1) Organizing the socialization of the Community Information Group (KIM); (2) Establishment of KIM; and (3) Provide KIM assistance. The methods used in this service activity are: Focus Group Discussion (FGD) to find out the potential of the community as human resources potential and use the empowerment method with the following steps: (1) awareness stage; (2) capacity building; and (3) empowerment. The results obtained were that the Cibaruyan Community Information Group (KIM) had been formed, Sukamaju Village, Cihaurbeuti District, Ciamis Regency and focused on: (1) creating an active, caring, sensitive and understanding community of information; (2) realizing information networks and two-way communication media between the community and the community and the community and the government; (3) carry out information communication activities through print media, electronic media and traditional media; (4) improve the community's ability to receive, filter and reject information; and (5) as a mediator of information and aspirations from the community to the government and the government to the community.

Keywords: Empowerment, Information Technology, Community, Sukamaju Village

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi seharusnya memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, khususnya masyarakat perdesaaan. Tetapi hal tersebut berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat perdesaaan yang masih dalam kluster prasejahtera. Informasi bohong atau dikenal dengan *hoax* masih menjadi permasalahan yang utama di era disrupsi saat ini.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ciamis pada tahun 2017 sebanyak 96,76 ribu jiwa, sedangkan di tahun 2018 berjumlah 85,72 ribu jiwa, dan di tahun 2019 berjumlah 75,41 ribu jiwa (Badan Pusat Statistik, 2019). Tingkat persentase penurunan angka penduduk dari tahun 2018 sampai tahun 2019 hanya berkisar 12,03%. Artinya, masih mempunyai potensi adanya kelompok masyarakat yang prasejahtera.

Begitu pula dengan masih adanya informasi bohong (*hoax*) menjadi sorotan utama dalam perkembangan teknologi informasi saat ini dan dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan di strata sosial masyarakat, khususnya masyarakat desa. Diperlukan langkah yang bersifat preventif dan komprehensif untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

Objek kajian dan mitra dalam pengabdian ini, yakni Karang Taruna Muda Karya yang ada di Desa Sukamaju Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis yang mempunyai potensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan di desa tersebut terdapat potensi pertanian beragam jenis sayuran dan hasil pertanian. Tetapi, tingkat produksi hasil pertanian tidak dibarengi dengan jejaring pasar yang masih terbatas, sehingga menyebabkan sulitnya memasarkan hasil pertanian dan masih terbatas akses informasi berkaitan dengan kegiatan pertanian modern.

Salah satu langkah solutif yang dapat dilakukan, yakni dengan pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 08 /Per/M.Kominfo/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, menyebutkan:

“....KIM, yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah”

Oleh karena itu, KIM dalam hal ini dapat menjadi jembatan pemberdayaan masyarakat berbasis data dan informasi yang akurat. Budhirianto (2015) menyatakan bahwa:

“KIM sebagai lembaga komunikasi nonformal di daerah, adalah pilihan tepat untuk menyukseskan program swasembada pangan (sustainability), karena dengan potensi informasi yang dimiliki masyarakat akan terintegrasi dalam pencapaian informasi yang kolektif, baik berbasis komunikasi komunitas ataupun berbasis media”

Dengan demikian, maka kolaborasi dalam penyelesaian 2 (dua) permasalahan utama dan adanya potensi yang ada, maka hal ini diharapkan dapat membantu dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Keberlanjutan pemberdayaan berbasis pemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan kontribusi dan akselerasi dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat perdesaan yang belum mempunyai akses informasi.

BAHAN DAN METODE

Modernisasi telah mengubah *mindset* masyarakat menjadi lebih apatis terhadap tingkat kesejahteraan mereka sendiri. Paradigma yang berkembang, yakni mereka hanya menunggu dari pihak lain untuk membantu mereka dalam meningkatkan kesejahteraan. Seharusnya hal tersebut harus segera ditinggalkan, karena berdampak pada laju perekonomian yang cenderung stagnan.

Adapun kerangka dalam pemecahan masalah dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan bertumpu pada kesadaran diri masyarakat. Untuk prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pengabdian ini, sejalan dengan konsep Karsidi (2007), yakni:

1. Belajar dari Masyarakat

Prinsip yang paling mendasar adalah prinsip bahwa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini berarti, dibangun pada pengakuan serta kepercayaan akan nilai dan relevansi pengetahuan tradisional masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah sendiri.

2. Pendamping sebagai Fasilitator

Masyarakat sebagai pelaku konsekuensi dari prinsip pertama adalah perlunya pendamping menyadari perannya sebagai fasilitator, dan bukannya sebagai pelaku atau guru. Untuk itu perlu sikap rendah hati serta kesediaan belajar dari masyarakat dan menempatkan warga masyarakat sebagai narasumber utama dalam memahami keadaan masyarakat itu sendiri.

3. Saling Belajar, Saling Berbagi Pengalaman

Salah satu prinsip pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat adalah pengakuan akan pengalaman dan pengetahuan lokal masyarakat.

Dengan demikian, kerangka dalam pemecahan masalah untuk khalayak sasaran berorientasi pada partisipasi masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam pola pemberdayaan yang akan diterapkan diharapkan menjadi stimulus agar masyarakat mempunyai motivasi untuk terus maju dan berkembang, serta mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan.

Analisis kebutuhan dari mitra atau khalayak sasaran menjadi langkah awal untuk realisasi pemberdayaan dan dari pihak tim pengabdian sebagai pendamping atau fasilitator. Konsep partisipatif yang disisipkan menjadi landasan untuk sebuah kemajuan masyarakat.

Menurut Hikam dalam Karsidi (2007), strategi penguatan *civil society*, sebaliknya ditujukan ke arah pembentukan gradual suatu masyarakat politik (*political-society*) yang demokratis-partisipatoris dan reflektif. Sehingga dalam upaya pemberdayaan diupayakan agar melibatkan secara penuh potensi aspiratif dalam masyarakat, sekaligus melakukan kritik secara terus menerus terhadap ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Hal ini akan menjadikan masyarakat menjadi lebih mempunyai peran dan diharapkan pemberdayaan dapat dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak yang positif dalam peningkatan ekonomi dan kompetensi SDM. Menurut Rahmawati (2008) bahwa:

“Teknologi informasi meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi yang digunakan untuk memproses dan menyebarkan informasi baik bersifat finansial maupun non finansial. Investasi di bidang teknologi informasi membutuhkan dana yang besar dan akan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Besarnya dana yang dikeluarkan tersebut mengharuskan organisasi untuk memanfaatkan teknologi informasi secara optimal”

Berdasarkan hal tersebut, teknologi informasi dapat dimanfaatkan oleh individu maupun organisasi dalam upaya penyelesaian permasalahan dan upaya dalam penentuan keputusan. Teknologi informasi banyak dimanfaatkan dalam dunia pelayanan publik. Menurut Parasuarman dalam Nasir & Oktari (2011) menyatakan, bahwa:

“Kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh penguasaan teknologi informasi dari karyawan suatu organisasi. Dengan aplikasi teknologi maka organisasi akan mengalami perubahan sistem manajemen, dari sistem tradisional ke sistem manajemen kontemporer. Teknologi informasi berkaitan dengan pelayanan, hal tersebut dikarenakan salah satu dimensi dari kualitas pelayanan adalah kecepatan pelayanan”

Sejalan dengan hal tersebut, maka pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu sumber daya dalam pengembangan suatu organisasi. Hal ini akan memungkinkan suatu

organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Upaya yang dapat dilakukan oleh *user* atau pengguna, yakni dengan mengoptimalkan media digital.

Hasil dari pengabdian yang dilakukan pada kelompok sasaran mitra, yakni telah terbentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Cibaruyan Desa Sukamaju Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis sesuai dengan SK Kepala Desa Sukamaju Nomor 141/Kpts7/Ds/2021 dengan jumlah total kepengurusan sebanyak 16 (enam belas) orang. Hal ini tentunya sudah sesuai dengan kerangka acuan KIM, yakni anggota KIM minimal 3-30 orang. Adapun struktur kepengurusan KIM Cibaruyan terdiri atas: (1) Pelindung; (2) Penasehat; (3) Ketua Umum; (4) Ketua; (5) Wakil Ketua; (6) Sekretaris; (7) Bendahara; (8) Seksi Organisasi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM); (9) Seksi Pengolahan dan Akses Informasi; (10) Seksi Pelayanan dan Diseminasi Informasi; (11) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif; (12) Sekbid Peternakan; (13) Sekbid Perikanan; (14) Sekbid Pertanian; (15) Sekbid Kebudayaan; serta (16) Sekbid Pariwisata. Menurut Herdono & Mutqiyah (2019), bahwa:

“Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) memiliki peran yang signifikan, khususnya dalam kaitan penyebaran informasi dan inovasi. Kelompok Informasi Masyarakat adalah lembaga pelayanan masyarakat yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat, sebagai layanan informasi terhadap isu-isu pembangunan. Eksistensi KIM ini tidak lepas dari campur tangan pemerintah”

Artinya antara masyarakat, pemerintah, dan para *stakeholder* bersinergis dalam menciptakan iklim informasi yang benar, serta dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Pola yang dapat diambil dalam hal ini, yakni KIM dapat menjadi *influencer* di tengah masyarakat. Keberadaan KIM tentunya akan berdampak pada pola komunikasi dan pemberdayaan yang ada di masyarakat perdesaan khususnya, yakni yang sebelumnya bersifat konvensional berubah menjadi lebih modern, serta terstruktur.

Menurut Yalia & Sumiaty (2019), tujuan dari adanya KIM, yaitu: (1) Mewujudkan jejaring diseminasi informasi nasional, (2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan, (3) Sebagai upaya meningkatkan nilai tambah, dan (4) Mendorong peningkatan kualitas media massa dan kecerdasan publik dalam mengonsumsi informasi.

Walaupun esensi dari KIM tersebut berorientasi pada peningkatan kualitas informasi yang diterima masyarakat, tetapi KIM dapat berperan dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat. KIM juga dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dan relevansinya akan menekan angka *hoax*.

KIM tersebut selain fokus pada diseminasi informasi, juga fokus pada pola pemberdayaan berbasis masyarakat dan pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia. Sinergitas antara Pemerintah Desa Sukamaju dengan KIM diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan SDA dan teknologi informasi. Masyarakat desa dengan adanya KIM dapat memberikan aspirasi dan kontribusi dalam pembangunan perdesaan berbasis kemasyarakatan desa.

KIM sebagai bagian dari akselalator pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di perdesaan harus dapat menjadi kelompok yang pro terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berbagai potensi desa tentunya dapat dimanfaatkan oleh KIM dalam menunjang kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Potensi yang dapat desa kembangkan selain dari produksi hasil bumi, desa mulai giat memperdayakan lingkungannya dan mengolahnya menjadi desa wisata (Haryani, 2020). Hal ini pula yang mendorong para pemuda desa dan masyarakat desa untuk membentuk KIM sebagai upaya dalam mendorong Desa Sukamaju menjadi Desa Wisata. Potensi SDA dan ditunjang dengan adanya SDM yang cukup di berbagai bidang, menjadikan Desa Sukamaju berpacu dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan.

Masyarakat desa merupakan potensi SDM dalam meningkatkan kesejahteraan dan berperan sebagai subjek dari pembangunan di perdesaan, Pemberdayaan masyarakat desa lebih cocok berbasis partisipasi masyarakat. Menurut Hilman & Nimasari (2018), bahwa:

“Pemberdayaan masyarakat sejatinya adalah proses dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya, sehingga masyarakat menjadi komunitas yang memiliki ketahanan dalam berbagai sektor dalam lini kehidupan”

Berdasarkan hal tersebut, maka pemberdayaan masyarakat terfokus pada masyarakat sekaligus menjadi subjek dan objek untuk bertransformasi menjadi lebih baik secara ekonomi. Adapun untuk siklus keberhasilan dalam pemberdayaan, menurut Adi dalam Gulo & Destriana (2018), bahwa:

1. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan (*recall depowering/empowering experiences*).
2. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan penidakberdayaan (*discuss reason for depowerment/empowerment*).
3. Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek (*identify one problem or project*).
4. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan (*identify useful power bases*).

5. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya (*develop and implement action plans*).

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat desa bertolak pada keinginan dan harapan masyarakat untuk berubah menjadi lebih sejahtera secara finansial. Selain itu, pengembangan masyarakat menjadi lebih madani akan menjadikan masyarakat berdaya secara sumber daya.

Namun demikian, diperlukan pendampingan yang bersifat keberlanjutan bagi KIM yang telah terbentuk. Hal itu dikarenakan KIM yang telah terbentuk masih membutuhkan arahan dan bimbingan. Peningkatan kualitas SDM di dalam struktur KIM juga harus terus dilakukan. Aksesibilitas terhadap jaringan internet masih menjadi kendala utama bagi KIM yang saat ini telah terbentuk. Sehingga diperlukan perluasan jaringan internet dan tentunya harus didukung oleh para *stakeholder*. Selain itu, diperlukan media interaktif untuk menunjang kegiatan KIM tersebut. Hal ini memungkinkan untuk diseminasi informasi dan tentunya sebagai media edukasi bagi masyarakat desa. Karena pemberdayaan masyarakat bukan soal kesejahteraan, tetapi pendidikan juga harus menjadi prioritas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pengabdian yang telah dilaksanakan, yakni telah terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Cibaruyan dengan tugas dan fungsi yang telah disusun. Aktivitas KIM tersebut meliputi: (1) akses informasi, yakni melakukan aktivitas untuk mengakses informasi dari berbagai sumber, baik sumber langsung maupun sumber tidak langsung; (2) diskusi, yakni setelah mengakses informasi kemudian dilakukan diskusi, tukar menukar informasi, pecahkan masalah; (3) implementasi, yakni tahapan yang sebelumnya diputuskan akan menerapkan dan mendayagunakan pengetahuan atau informasi yang diperoleh; (4) *networking*, yakni jaringan kelembagaan yang merupakan hubungan dengan kelompok/lembaga/instansi teratur dalam rangka saling tukar menukar informasi dan pengalaman dalam pendayagunaan informasi; (5) diseminasi informasi, yakni penyebarluasan informasi dilakukan bila informasi itu sudah diolah kemudian disebarluaskan informasi ke lingkungan sekitar; serta (6) aspirasi, yakni serap dan salurkan aspirasi masyarakat.

Dengan demikian, KIM merupakan lembaga formal yang bersifat netral dan merupakan agen dari penyebar kebenaran dari sebuah informasi. KIM juga dapat dikatakan sebagai lembaga yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat dan dapat bertindak

sebagai aktor pembaharu di tingkat *grassroots* (akar rumput). Sosialisasi dan edukasi merupakan kunci dalam pengembangan KIM yang berkelanjutan.

Saran

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang telah terbentuk memerlukan beberapa perbaikan. Adapun rekomendasi yang disarankan, sebagai berikut:

1. KIM memerlukan pengakuan/penguatan dari masyarakat dan lembaga pemerintah. Artinya bukan hanya penguatan dari pemerintah desa, tetapi juga harus sampai ke tingkat pemerintah daerah.
2. KIM di Desa Sukamaju Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis memerlukan pembentukan pusat/warung informasi sebagai tempat dimana masyarakat dapat mengetahui dan memperoleh informasi yang diperlukan.
3. Pusat informasi yang telah terbentuk harus memiliki basis data (tulisan tangan ataupun disusun dengan teknologi informasi).
4. Pendanaan KIM harus berasal dari kegiatan usaha yang diperuntukkan untuk dana operasional dan kesejahteraan anggota KIM.
5. KIM yang telah terbentuk merupakan mitra kerja pemerintah untuk
6. melaksanakan pembangunan seluruh masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Galuh yang telah memberikan dana hibah dalam program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) tahun anggaran 2020. Selain itu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemerintah Desa Sukamaju yang telah memberikan izin dalam rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2019). Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2019. (Online) Tersedia: <https://jabar.bps.go.id/dynamictable/2020/01/29/190/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-barat-ribu-orang-2019.html> [05 September 2020].
- Budhirianto, S. (2015). Pola Komunikasi untuk Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat dalam Menyukkseskan Program Swasembada Pangan. *Pekommas*, 18(2), 222415.
- Gulo, Y., & Destriana, N. (2018). Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan Berbasis Partisipasi Warga Menuju Peningkatan dan Kemandirian Pengelolaan Ekonomi di Desa

- Parakanlima, Cirinten, Lebak-Banten. *Sakai Sambayan Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(3), 118-124.
- Haryani, T. N. (2020). Pendampingan Kelompok Informasi Masyarakat Desa Sumberdodol Kabupaten Magetan dalam Pengembangan Iklan Pariwisata Desa. *Aptekmas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2).
- Herdono, I., & Mutqiyyah, R. (2019). Pola Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Prigen Pasuruan dalam Penyebaran Informasi ke Masyarakat. *MEDIAKOM*, 3(1), 27-39.
- Hilman, Y. A., & Nimasari, E. P. (2018). Model Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Komunitas. *ARISTO*, 6(1), 45-67.
- Karsidi, R. (2007). Pemberdayaan masyarakat untuk usaha kecil dan mikro (Pengalaman Empiris di Wilayah Surakarta Jawa tengah). *Jurnal Penyuluhan*, 3(2).
- Nasir, A., & Oktari, R. (2011). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar). *Jurnal Ekonomi*, 19(02).
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 08 /Per/M.Kominfo/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.
- Rahmawati, D. (2008). Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 5(1).
- Yalia, M., & Sumiaty, N. (2019). Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial Kelompok Informasi Masyarakat. *Dialektika*, 6(2), 150-163.